

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
STRUCTUR AND COMPANY CHARACTERISTICS ON THE DISCLOSURE OF  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SUSTAINABILITY REPORTS  
(Empirical Study of State-Owned Enterprises Non-Financial that Listing in Indonesia  
Stock Exchange for Periods 2012-2014)**

**Aulia Ikmal**  
/auliaikmal@gmail.com  
Universitas Bakrie  
Hermiyetti  
[Hermi\\_yetti@yahoo.com](mailto:Hermi_yetti@yahoo.com)  
Universitas Bakrie  
M.Th. Anitawati  
[anitawati@bakrie.ac.id](mailto:anitawati@bakrie.ac.id)  
Universitas Bakrie  
usmar  
[usmar88@yahoo.com](mailto:usmar88@yahoo.com)  
Universitas Moestopo

**Abstract:** *This research aims to analyze the influence of Corporate Governance structure which is represented through the proportion of the board of independent commissioner, government shareholdings, and foreign shareholdings, along with the company characteristics that is interpreted through the profitability, company size, and the type of industry to the disclosure of the Corporate Social Responsibility in the Sustainability Report. The research population is BUMN companies registered in IDX for the period of 2012-2014. Samples are selected by purposive sampling method for each year during 2012 to 2014, obtaining 51 samples in total. This research uses the descriptive analysis and logistic regression method by using SPSS 20 program.*

*Based on the hypothesis test, it proves that the proportion of the board of independent commissioner, government shareholdings and profitability negatively influence but not significant to the disclosure of corporate social responsibility in the sustainability report because of the influence of political interest and limited company profit allocation to disclose the corporate social responsibility. Foreign shareholdings, company size and type of industry have positive but not significant influence to the disclosure of corporate social responsibility in the sustainability report because foreign investors tend to give attention to the social and environment issue. There is also a regulation to that force companies that use natural resources to disclose its corporate social responsibility in the sustainability report.*

**Keywords:** *Corporate Governance, Company Characteristics, Corporate Social Responsibility, Sustainability Report*

## PENDAHULUAN

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif dan negatif. Perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam (Sulistyowati, 2004).

Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Menurut Suryawijaya dan Setiawan (1998), sebagai suatu instrumen ekonomi, perusahaan tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari *stakeholders* perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan mejadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. *Stakeholder* yang dimaksud diantaranya adalah para *stakeholder*, karyawan (buruh), pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya (Lusa, 2007).

*Sustainability Reporting* memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). *Sustainability* (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara *people-planet-profit*, yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL). *Sustainability* terletak pada pertemuan antara tiga aspek, *people-sosial*; *planet-environment*; dan *profit-economic*. Maka menurut Elkington (1997) perusahaan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan mekanisme GCG, perusahaan dituntut tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi dari kegiatannya tapi juga nilai tambah lain, keseimbangan kepentingan *stakeholders*, dan kepatuhan terhadap peraturan serta norma yang berlaku atas kegiatan yang dilakukan. Jadi semakin baik penerapan GCG maka semakin baik pengungkapan CSR perusahaan (Handayani, 2011). Pada penelitian kali ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat melalui mekanismenya yang diproksikan dengan proporsi Dewan Komisaris Independen dan proporsi kepemilikan asing.

Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan (Ratnasari, 2011). Semakin besar persentase Komisaris Independen, maka akan meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan dan mengurangi usaha menutupi informasi perusahaan (Prasojo, 2011).

Kepemilikan saham pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Dengan adanya tekanan dan sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih transparan dalam pengelolaannya (Amran & Devi, 2008). Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Mekanisme penerapan *corporate governance* juga didukung oleh proporsi kepemilikan asing, yaitu besaran kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing dari seluruh total saham beredar milik perusahaan. Kepemilikan asing dianggap memiliki peranan besar terhadap pengungkapan CSR karena pihak asing merupakan pihak yang dianggap *concern* (perhatian) terhadap pengungkapan CSR. Investor asing akan berinvestasi pada daerah yang aman, tidak banyak tuntutan baik dari masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah. Sehingga, investor asing dalam membuat keputusan investasi tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan sosiologis.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang masih bersifat sukarela di Indonesia membuat implementasinya akan berbeda sesuai situasi kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri khusus atau sifat khas yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik perusahaan sendiri merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan, dan membedakannya dengan perusahaan lain.

Pengungkapan CSR disinyalir dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor karakteristik perusahaan, salah satu diantaranya adalah profitabilitas. Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Meek, *et al.* (1995) yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki *profit* lebih besar harus lebih aktif dalam melaksanakan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan CSR memiliki keterkaitan satu sama lain. Profitabilitas dan pengungkapan CSR memiliki keterkaitan satu sama lain. Profitabilitas yang tinggi memicu para *stakeholder* untuk meningkatkan kepentingan dan harapan dari para *stakeholder* yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka pengungkapan CSR akan cenderung semakin besar.

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan selama mengelola kekayaan perusahaan (Soelistyoningrum, 2011). Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang akan menunjukkan seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Brigham & Houston, 2010).

Menurut Machfoed (1998) dalam Sylvia (2011) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada penelitian kali ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Sinaga (2011) juga menyatakan bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena menghadapi tekanan politis dari berbagai pemangku kepentingan yang juga lebih besar. Selain itu, perusahaan besar juga dianggap memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengungkapan CSR dalam *sustainability report*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peran *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report* pada perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Pengungkapan *Sustainability Report***

Bagian ini menetapkan isi dasar yang harus muncul dalam sebuah laporan keberlanjutan. Isi dasar tersebut mengacu pada standar pengungkapan dan harus dimasukkan dalam *sustainability report* berdasarkan standar GRI (2006). Standar pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keberlanjutan: 1) Strategi dan Profil: Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks untuk memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, profil, dan tata kelola; 2) Pendekatan Manajemen: Pengungkapan yang mencakup mengenai bagaimana sebuah organisasi menggunakan topik tertentu untuk memberikan konteks dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu; 3) Indikator Kinerja : Indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Semakin luasnya wilayah perasi dan semakin besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh perusahaan multinasional menyebabkan meningkatnya tuntutan atas tanggung jawab perusahaan tersebut pada efek-efek sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Berkaitan dengan hal ini, Larsson (2003) menyatakan bahwa di dalam era globalisasi dan terbuka seperti saat ini, terdapat kecenderungan pertumbuhan akan kebutuhan merek-merek dan identitas perusahaan yang bersih. Enquist, *et al.* (2005) menyatakan bahwa setelah gelombang orientasi pada produksi (*production oriented*) dan kemudian diikuti oleh gelombang ketiga yaitu perspektif *sustainability* atau menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan pemikiran *triple bottom line*.

### **Corporate Governance**

*Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Corporate Governance* (CG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

#### **Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (Ratnasari, 2011).

#### **Kepemilikan Saham Pemerintah (*Government Shareholding*)**

Kepemilikan saham pemerintah (*government shareholding*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran & Devi, 2008).

#### **Kepemilikan Saham Asing (*Foreign Shareholding*)**

Kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Jika dilihat dari sisi *stakeholder* perusahaan, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Puspitasari, 2009).

#### **Karakteristik Perusahaan**

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang & Lundholm, 1993 dalam Rosmasita, 2007). Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara entitas yang satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan mengacu pada penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) yaitu kepemilikan saham pemerintah (*government shareholding*), kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*), ukuran perusahaan (*corporate size*), tipe industri (*industri type*), profitabilitas (*profitability*). Sebagai variabel tambahan adalah regulasi pemerintah (*Government Regulation*).

**Profitabilitas (*Profitability*)**

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Heinze (1976); Gray, *et al.* (1995); dalam Sembiring (2005) profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan CSR kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. Hackston dan Milne (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial.

**Ukuran Perusahaan (*Corporate Size*)**

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap kualitas ungkapan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hamper selalu konsisten dan secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989 dalam Rosmasita, 2007).

**Tipe Industri (*Industry Type*)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-21/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN persero tbk dibedakan menjadi dua tipe industri, yaitu industri Sumber Daya Alam (SDA) atau perusahaan BUMN yang bisnisnya berfokus pada pengelolaan SDA dan industri yang tidak berhubungan dengan SDA atau perusahaan BUMN yang bisnisnya tidak berfokus pada pengelolaan SDA. Industri SDA sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, karena industri SDA memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan karena kegiatan operasional perusahaannya. Sehingga, keadaan tersebut memuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya. Industri yang tidak berhubungan dengan SDA adalah kebalikannya. Perusahaan ini memiliki dampak terhadap lingkungan, karena aktivitas perusahaannya tidak berhubungan dengan pengelolaan SDA, sehingga tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya meskipun dalam melakukan aktivitasnya

tersebut perusahaan melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report***

**H2: Besarnya kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.**

**H3 : Besarnya kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.**

**H4 : Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.**

**H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.**

**H6: Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.**

### **MODEL PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014. Pemilihan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

#### **Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria**

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014	16
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara konsisten selama periode pengamatan	(0)
3	Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap (sesuai variabel)	(2)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria		14
Total sampel pengamatan selama 3 tahun		42

## Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara empiris mengenai pengaruh struktur *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

### Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i> (Y)		Mengungkapkan <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i> = 1,
		Tidak mengungkapkan <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i> = 0
Struktur <i>Corporate Governance</i> (X1)	Dewan Komisaris Independen (X1.1)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Indep}_i$
	Kepemilikan Saham Pemerintah (X1.2)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{KSP}_i$
	Kepemilikan Saham Asing (X1.3)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{KSA}_i$
		$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{KSA}_i$
Karakteristik Perusahaan (X2)	Profitabilitas (X2.1)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Profit}_i$
	Ukuran Perusahaan (X2.2)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Ukuran}_i$
	Tipe Industri (X2.3)	$\log \text{total asset}$
		Industri SDA = 1, Industri Non SDA = 0

### Metode Analisis Data

Alat analisis regresi yang digunakan jika variabel terikat merupakan skala nominal adalah regresi logistik. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah ada sebelumnya, maka model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

$$\text{CSR} = \beta_0 + \beta_1 \text{Cind} + \beta_2 \text{GS} + \beta_3 \text{FS} + \beta_4 \text{ROA} + \beta_5 \text{TYPE} + \beta_6 \text{LSIZE}$$

Keterangan:

CSRSD : *Corporate Social Responsibility Disclosure*

BCind : proporsi dewan komisaris independen

GS : presentase kepemilikan saham pemerintah

FS : presentase kepemilikan saham asing

ROA : profitabilitas, proksi ROA

TYPE : tipe industri, industri SDA = 1, industri non SDA = 0

LSIZE : ukuran perusahaan (total asset)

## HASIL PENELITIAN

### Pengungkapan CSR di dalam Sustainability Report

		SR			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0		11	26.2	26.2	26.2
Valid 1		31	73.8	73.8	100.0
Total		42	100.0	100.0	

Perusahaan yang mengungkapkan CSR di dalam *Sustainability Report* sebesar 73,8% dari total sampel perusahaan BUMN non keuangan, Sedangkan perusahaan tidak mengungkapkan *sustainability report* 26,2% dari total sampel perusahaan BUMN non keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan terdaftar di BEI sudah melakukan pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* sebagai bentuk laporan sukarela yang disajikan secara terpisah dari *annual report*.

### STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	42	.2500	.6000	.399943	.0898266
GS	42	.5100	.8066	.648379	.1003043
FS	42	.0085	.4168	.130486	.1184541
ROA	42	-.1200	.1854	.061555	.0677340
CS	42	1.19	140.90	25.0348	31.33098
Valid N (listwise)	42				

### **Dewan Komisaris Independen**

Variabel dewan komisaris independen dari sampel perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris independen paling rendah (minimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk sebanyak 2 anggota dewan komisaris independen dari 8 orang total dewan komisaris, sedangkan paling tinggi (maximum) adalah PT Semen Baturaja (Persero) Tbk sebanyak 3 anggota dewan komisaris independen dari 5 orang total dewan komisaris. Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah anggota dewan komisaris independen sebesar 0,3999 lebih besar dari standar deviasi yang hanya sebesar 0,0898.

### **Kepemilikan Saham Pemerintah**

Variabel Kepemilikan Saham Pemerintah dari sampel perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham pemerintah paling sedikit (minimum) adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yaitu sebesar 51,00%, sedangkan proporsi kepemilikan saham pemerintah paling banyak (maksimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk sebanyak 80,66%. Nilai rata-rata yang diperoleh dari proporsi kepemilikan saham pemerintah sebesar 0,6483 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 0,1003.

### **Kepemilikan Saham Asing**

Variabel Kepemilikan Saham Asing dari sampel perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham asing paling sedikit (minimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk yaitu sebesar 0,85%, sedangkan proporsi kepemilikan saham asing paling banyak (maksimum) adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 41,68%. Nilai rata-rata yang diperoleh dari proporsi kepemilikan saham pemerintah sebesar 0,1304 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 0,1184.

### **Profitabilitas**

Variabel Profitabilitas dari sampel perusahaan yang memiliki profitabilitas paling kecil (minimum) adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar -12%, sedangkan profitabilitas paling besar (maksimum) adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 18,54%. Nilai rata-rata yang diperoleh dari profitabilitas sebesar 0,0616 lebih kecil dari standar deviasinya sebesar 0,0677.

### Ukuran Perusahaan

Variabel Ukuran Perusahaan dari sampel perusahaan yang memiliki Ukuran Perusahaan paling kecil (minimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp 1.248.343.000.000,00, sedangkan ukuran perusahaan paling besar (maksimum) adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebanyak Rp 140.900.000.000.000,00. Nilai rata-rata yang diperoleh dari profitabilitas sebesar 25,03 lebih kecil dari standar deviasinya sebesar 31,33.

### Tipe Industri

		TI			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0		18	42.9	42.9	42.9
Valid	1	24	57.1	57.1	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Tabel di atas menunjukkan perusahaan yang tergolong di dalam industri *bukan* SDA atau termasuk ke dalam kelompok industri yang terdiri dari bidang usaha konstruksi, sarana dan prasarana perhubungan, bidang usaha jasa keuangan, jasa survey dan konsultan, serta bidang usaha restrukturisasi dan pengembangan usaha sebanyak 18 perusahaan atau sebesar 42.9%. Sedangkan perusahaan yang tergolong di dalam industri SDA atau termasuk ke dalam kelompok industri yang terdiri dari bidang usaha industri agro dan farmasi, bidang usaha energi, logistik, kawasan, dan pariwisata, serta bidang usaha pertambangan, industri strategis, dan media sebanyak 24 perusahaan atau sebesar 57.1%.

### Regresi Logistik

Pada penelitian ini, hipotesis dikembangkan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh output regresi logistik pada tabel berikut:

#### Regresi Logistik Variabel In The Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
	KI	-.613	.625	.961	1	.327	.542
	GS	-.833	.917	.825	1	.364	.435
Step 1 <sup>a</sup>	FS	.525	.856	.376	1	.540	1.690
	ROA	-.019	.659	.001	1	.976	.981
	CS	.118	.632	.035	1	.852	1.125

TI	1.691	1.237	1.870	1	.171	5.426
Constant	1.832	3.365	.297	1	.586	6.247

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CSR} = 9.789 - 0.613\text{KI} - 0.833\text{GS} + 0.525\text{FS} - 0.019\text{ROA} + 0.118\text{CS} + 1.691\text{TI}$$

**Overall Model Fit**

*Overall Model Fit*

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	39.807 <sup>a</sup>	.121	.180

Hasil *output* SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cox Snell R Square* sebesar 0,121 dan nilai Nagelkerke R<sup>2</sup> adalah 0,180. Hasil ini berarti bahwa variabilitas variabel dependen (*sustainability report*) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (dewan komisaris independen, kepemilikan saham pemerintah, kepemilikan saham asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri) sebesar 18%.

**Analisis Uji Kelayakan Model Regresi**

*Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.911	8	0.350

Tampilan *output* SPSS pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit* sebesar 8,911 dengan probabilitas signifikansi 0,350 diatas 0,05 maka model dikatakan fit dan model dapat diterima.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report***

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka analisa pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* yang diproksikan melalui variabel dewan komisaris independen, kepemilikan saham pemerintah dan kepemilikan saham asing adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report***

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel dewan komisaris independen yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris terbukti berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

Keefektifan dewan komisaris independen yang dilihat dari proporsi dewan komisaris independen di perusahaan BUMN, dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata proporsi dewan komisaris sebesar 39,24%. Nilai rata-rata 39,24% mengindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi batas minimum dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000. Akan tetapi walaupun sudah memenuhi kriteria minimal tersebut, besarnya proporsi yang sesuai belum tentu meningkatkan atau mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa besarnya proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*. Pertama, karena struktur *governance* sebuah BUMN terdiri dari Kementerian BUMN (serta Departemen Keuangan, dan Departemen Teknis) sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan setiap BUMN, dan pihak pengawas (dewan komisaris) dan pengelola (dewan direksi) sehingga jika dilihat dari peranan *governance* maka tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya karena terdapat banyaknya kepentingan di dalam suatu BUMN yang dapat dilihat melalui berbagai kasus dan yang paling sering terdengar adalah kasus korupsi seperti yang terjadi belum lama ini yaitu proyek pembangunan wisma atlet hambalang dimana salah satu perusahaan BUMN, PT Adhi Karya, Tbk juga ikut terlibat menjadi salah satu tender di dalam proyek tersebut sehingga kasus ini mengindikasikan kurangnya pengungkapan terhadap suatu informasi di dalam BUMN. Termasuk kepentingan politik yang ada di dalam BUMN sehingga menyebabkan tingkat

*monitoring* yang dilakukan dewan komisaris independen menurun, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya dorongan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan sosial. Kedua, kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi menjadi terbatas karena pihak-pihak terafiliasi seperti Departemen Teknis terkait yang mengawasi langsung terhadap operasional BUMN yang ada di perusahaan lebih mendominasi sehingga dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan.

#### **Kepemilikan Saham Pemerintah terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report***

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemilikan saham pemerintah yang diukur dengan proporsi kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

Pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* adalah sebuah bukti bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap lingkungan sosialnya. Pengungkapan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* di dalam sebuah perusahaan. *Stakeholder* yang dimaksud disini adalah para investor, karyawan, masyarakat, dll. Akan tetapi jika dilihat dari proporsi kepemilikan saham pada perusahaan BUMN, proporsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia sudah pasti memiliki persentasi diatas 50%. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar modal yang dimiliki BUMN merupakan partisipasi dari pemerintah Indonesia dimana sumber dana yang dialirkan ke perusahaan-perusahaan BUMN merupakan sumber dana yang berasal dari kas negara. Karena besarnya proporsi kepemilikan dan penyertaan modal di dalam BUMN, maka pemerintah merupakan pihak pengambil keputusan terkuat di dalam BUMN. Dengan adanya hak terbesar pemerintah disetiap keputusan yang diambil, maka kepentingan *stakeholder* pada perusahaan BUMN seperti melakukan pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* tidak dijadikan pilihan utama dalam menentukan kebijakan.

#### **Kepemilikan Saham Asing terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report***

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemilikan saham asing yang diukur dengan proporsi kepemilikan saham asing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

Secara umum perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham yang seluruh atau memiliki proporsi paling sedikit 51% yang dimana saham tersebut dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, hal ini diatur di dalam Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, sehingga kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing tidak boleh melebihi jumlah atau proporsi yang telah dinyatakan dalam peraturan tersebut.

Pada umumnya, kepemilikan asing didalam sebuah perusahaan cenderung untuk turut peduli terhadap isu-isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan sebagai isu kritis yang secara ekstensif harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Akan tetapi peran investor asing pada sebuah perusahaan BUMN dalam memberikan dorongan untuk melakukan pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* akan sangat kecil sekali, karena melihat jumlah proporsi kepemilikan asing pada perusahaan BUMN di Indonesia dibandingkan dengan proporsi kepemilikan saham pemerintah menunjukkan persentase kepemilikan yang sangat kecil seperti PT Indofarma, Tbk yang hanya memiliki sekitar 1% total kepemilikan asing dari jumlah saham yang beredar dan hal ini dapat dilihat dari hasil statistika deskriptif yang menunjukkan angka 0,168 sehingga perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham asing diatas 16,8% yang akan lebih cenderung mengungkapkan CSR di dalam *sustainability report* seperti yang dilakukan oleh PT Jasa Marga, Tbk, PT Semen Indonesia, Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Pemilik saham asing tersebut baik perseorangan maupun institusi tidak memiliki hak untuk menentukan BUMN dalam membuat kebijakan dikarenakan kepemilikan saham yang kurang dominan tersebut.

#### **Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di dalam *Sustainability Report***

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka analisa pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* yang diprosikan melalui variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan tipe industri adalah sebagai berikut:

#### **Profitabilitas terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report***

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel profitabilitas yang diukur dengan persentase *Return on Asset* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

Profitabilitas seharusnya dapat menjadi pertimbangan penting pengungkapan CSR. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki sumber daya finansial untuk melaksanakan kegiatan CSR dan mengungkapkannya, begitu juga sebaliknya ketika perusahaan lebih mempertimbangkan pengeluaran dananya

untuk kegiatan yang tidak memberikan profit untuk perusahaan, seperti melaksanakan kegiatan CSR dan mengungkapkannya.

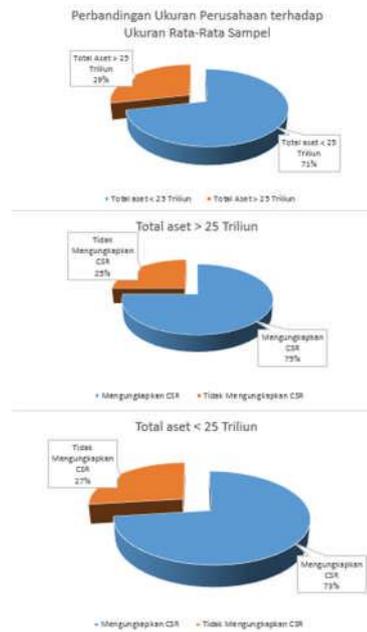
Berdasarkan tingkat profitabilitasnya, didapatkan rata-rata perusahaan yang memiliki profitabilitas berdasarkan indeks ROA diatas 6% cenderung mengungkapkan CSR di dalam *sustainability report* diantaranya adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Namun hasil dalam penelitian ini variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*. Hal ini disebabkan karena masih terlihat beberapa perusahaan BUMN yang memperoleh keuntungan namun dengan persentasi yang masih rendah bahkan merugi seperti halnya PT Krakatau Steel (Persero). Hal ini mungkin saja terjadi pada perusahaan BUMN di Indonesia, karena sumber dana yang dijadikan modal operasional perusahaan BUMN merupakan modal yang berasal dari kas negara. Pemberian modal yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan BUMN tentunya mengarah pada *profit* untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya BUMN. Namun, keuntungan yang diperoleh pemerintah terlihat sangat minim. Oleh karena itu, besarnya profit yang diperoleh pemerintah dari perusahaan BUMN akan langsung difokuskan untuk membangun perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik.

Selain itu, terkait dengan ketentuan tentang pelaksanaan program sosial BUMN, yang disebutkan didalam Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 dinilai masih kurang fleksibel terutama mengenai hal-hal yang menyangkut tentang alokasi bidang bantuan. Pembatasan terhadap lima objek bantuan (pendidikan, kesehatan, sarana umum, sarana ibadah dan bencana alam) seringkali tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Selain itu, skema bantuan Program Bina Lingkungan yang mengharuskan penyaluran bantuan secara langsung oleh BUMN yang bersangkutan juga tidak memungkinkan adanya institusi pendamping. Oleh karena itu, jarang sekali program sosial yang dilaksanakan oleh BUMN dikerjasamakan dengan LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Kurangnya alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan sosial BUMN yang hanya sebesar 1% dari laba perusahaan juga dipastikan tidak akan cukup bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan sosialnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengambil keputusan baiknya memperhatikan *feedback* atas pengalamannya selama ini dalam menyelenggarakan program-program sosial. Apalagi sudah terbukti bahwa terdapat sejumlah aspek yang diatur dalam Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 dinilai kurang fleksibel, dan justru menjadi kendala bagi implementasi kegiatan sosial perusahaan BUMN itu sendiri.

### Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan jumlah total aset berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI termasuk ke dalam kelompok perusahaan besar berdasarkan kategori ukuran perusahaan yang telah ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional karena memiliki total aset lebih dari 10 Milyar Rupiah. Perusahaan besar memiliki visibilitas publik yang lebih tinggi terhadap kelompok eksternal sehingga kegiatan yang dilakukan perusahaan pun akan semakin mengarah untuk membangun citra perusahaan menjadi semakin lebih baik, salah satunya dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang kemudian dilaporkan pada laporan CSR yang diungkapkan secara terpisah di dalam *sustainability report*.



### Perbandingan Ukuran Perusahaan terhadap Ukuran Rata-Rata Sampel

Gambar di atas menggambarkan persentase pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* yang dilihat dari ukuran besar kecilnya perusahaan melalui nilai rata-rata jumlah total

aset perusahaan BUMN non keuangan. Hasil tersebut menggambarkan, perusahaan dengan total aset diatas 25 Triliun terbukti mengungkapkan CSR dengan persentase yang lebih besar daripada perusahaan BUMN non keuangan yang memiliki total aset dibawah 25 Triliun.

Perusahaan BUMN non keuangan yang memiliki total aset diatas nilai *mean* dari sampel yang dipilih diantaranya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN non keuangan tersebut termasuk ke dalam kelompok perusahaan yang memiliki total aset lebih besar di atas 25 Triliun. Hasil temuan ini sangat sesuai mengingat ukuran perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, mengalami peningkatan yang dilihat dari segi total asetnya sehingga berdampak pada kinerja perusahaan untuk semakin lebih baik karena perusahaan dengan ukuran total aset besar akan semakin menjadi pusat sorotan publik, sehingga dengan semakin banyaknya pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan akan sangat efektif bagi perusahaan dalam upaya mewujudkan akuntabilitas publik. Hal ini membuktikan bahwa, semakin besar ukuran sebuah perusahaan memiliki pengaruh untuk semakin melakukan kewajibannya dalam mengungkapkan CSR di dalam *sustainability report*.

#### **Tipe Industri terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report***

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel tipe industri yang diukur dengan variabel *dummy* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* disebabkan oleh industri SDA atau berhubungan langsung dengan pengelolaan SDA, dimana tipe industri ini merupakan industri yang memanfaatkan dan mempunyai dampak secara langsung terhadap lingkungan. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-100/MBU/06/2015 yang menyatakan tentang pembagian badan usaha milik negara kedalam beberapa kelompok bidang usaha yaitu: 1) Bidang usaha industri agro dan farmasi; 2) Bidang usaha energi, logistik, kawasan, dan pariwisata; 3) Bidang usaha pertambangan, industri strategis, dan media; 4) Bidang usaha konstruksi, sarana dan prasarana perhubungan; 5) Bidang usaha jasa keuangan, jasa survey dan konsultan; dan 6) Bidang usaha restrukturisasi dan pengembangan usaha. Dari kelompok bidang usaha tersebut bidang usaha BUMN seperti bidang usaha industri agro dan farmasi, bidang usaha energi, logistik, kawasan, dan pariwisata, serta bidang usaha pertambangan, industri strategis, dan

media, ketiga kelompok bidang usaha tersebut merupakan perusahaan BUMN yang termasuk kedalam industri SDA atau berhubungan langsung dengan pengelolaan SDA dan secara wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-21/MBU/2008.

Kelompok perusahaan BUMN tersebut juga telah diatur melalui beberapa regulasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut antara lain Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001, Undang-undang Pertambangan Umum No. 11 Tahun 2007 1967, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengenai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan, dan Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat, sehingga industri seperti PT Indofarma, PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Bukit Asam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam *sustainability report*.

Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini diketahui termasuk ke dalam kategori perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh kuat untuk memaksa perusahaan agar tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang *recovery cost* dimana pemerintah Indonesia dalam peraturan ini menyatakan 24 jenis biaya yang tidak boleh dibebankan dalam biaya operasional perusahaan migas. Sehingga, perusahaan migas yang tergolong ke dalam tipe industri SDA dapat mengalokasikan beban tersebut untuk mengungkapkan pertanggungjawabannya terhadap lingkungan operasionalnya. Selain itu perusahaan yang termasuk ke dalam kategori perusahaan BUMN sebagian besar telah memiliki inisiatif yang lebih terhadap pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* yang bersifat *voluntary* hal ini dibuktikan dari hasil statistika deskriptif diatas dimana pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN telah mencapai sekitar 68% dari total sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh struktur *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di dalam *sustainability report* pada perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Berdasarkan pengolahan data dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.
2. Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.
3. Kepemilikan saham asing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.
4. Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.
5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.
6. Tipe Industri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

### Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis pada penelitian ini yang mungkin dapat disempurnakan untuk pengembangan penelitian berikutnya. Adapun beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian antara lain:

1. Tidak semua perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI mempublikasikan *sustainability report*, sehingga peneliti tidak bisa mengetahui secara rinci indikator apa saja yang telah dilaksanakan terkait pengungkapan CSR perusahaan BUMN non keuangan tersebut.
2. Penelitian ini menggunakan penyederhanaan pengukuran terhadap variabel dependen pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* yaitu dengan menjadikan variabel tersebut menjadi variabel *dummy*. Pemberian nilai 0 untuk perusahaan yang mengungkapkan CSR di dalam *sustainability report* dan nilai 1 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR di dalam *sustainability report*

masih terlalu sederhana sehingga kurang menggambarkan bagaimana pengungkapan CSR perusahaan yang sebenarnya.

### Saran

Penelitian yang telah dilakukan ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berikut saran yang dapat diberikan agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik:

1. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan merupakan variabel *dummy* yang hanya melihat apakah perusahaan mengungkapkan atau tidak, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperhatikan luas pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*, serta kualitas dari isi *sustainability report* dengan melihat indikator-indikator pengungkapan yang sesuai dengan Pedoman *Sustainability Report GRI*.
2. Sampel dari penelitian ini menggunakan semua jenis perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasilnya bersifat *general* dan tidak spesifik. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel perusahaan dengan jenis perusahaan yang lebih spesifik, misalnya perusahaan BUMN bidang usaha jasa keuangan.
3. Melakukan penambahan jangka waktu penelitian, untuk melihat hasil dalam periode jangka panjang mengenai pengaruh struktur *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR di dalam *sustainability report*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, G. N. (2008). Pengungkapan Sustainability Report Tahun 2006 pada Enam Perusahaan di Industri Pertambangan. *Skripsi*.
- Amran, A., & Devi, S. (2008). The Impact of Government and Foreign Affiliate Influence and Social Reporting in Malaysia. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 23.
- Brigham, & Houston. (2010). *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Jakarta: Salemba empat.
- Carrol, B. A. (1979). A three dimensional conceptual model of corporate performance. *The Academy of Management Review*, 4, 497-505.
- Chariri, A. (2009). Retorika Dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik atas Sustainability Reporting PT Aneka Tambang Tbk. *Symposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.

- Chresma, T. (2008, April 4). Retrieved January 20, 2016, from wordpress: <https://theowordpower.wordpress.com/2008/04/04/mengungkap-praktik-corporate-social-responsibility-dan-prospeknya-dalam-mencegah-kerusakan-lingkungan/>
- Darwin, A. (2004). Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta.
- Darwin, A. (2008, Oktober). Majalah Akuntan Indonesia. *Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan Indonesia*.
- Dilling. (2009). Sustainability Reporting In A Global Context: What Are The Characteristics of Corporatons That Provide High Quality Sustainability Reports-An Empirical Analysis. *International Business & Economics Research Journal*, 9.
- Elkingotn, J. (1997). *The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. London: Capstone Publishing Ltd.
- Enquist, B., Johnson, M., & Skalen, P. (2005). A Stakeholder view for a successful corporate social responsibility adoption.
- Fitri, G. N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Vol. 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi* (3 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI. (2006). *Pedoman Laporan Keberlanjutan*. Retrieved November 21, 2015, from <http://www.globalreporting.org>
- Hackston, D., & Milne, M. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosures In New Zaeland Companies. *Accounting, Auditing, and Accountability*, 9, 77-108.
- Handayani, M. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. *Skripsi*.
- Idah. (2013). Peran Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Terdaftar di BEI. *Skripsi*.
- Jaya, A. (2004). Konsep Pembangunan Berkelanjutan.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*.
- Lusa, J. S. (2008). *Mencari Bentuk Ideal TAnggung Jawa Sosial Perusahaan*. Retrieved November 20, 2015, from <http://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/>
- Luthfia, K. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report. *Skripsi*.
- Machmud, N., & Djakman, C. D. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pda Laporan Tahunan

Perusahaan : Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi 2011*.

- McGuire, J. B., T. S., & Sundgren. (1988). Corporate social responsibility, and firm financial performance. *Academy of management journal*, 854-872.
- Mulyadi. (2002). *Auditing: Buku 1 Edisi Enam*. Jakarta: Salemba 4.
- Nuryana, M. (2005). Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *Diklat Pekerjaan Sosial Industri*. Lembang: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS).
- Prasojo, B. P. (2011). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tingkat Pelaporan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Skripsi*.
- Purwanto, A. (2011, November). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, 1-94.
- Putri, C. D. (2013). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Ratnasari, Y. (2010). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam Sustainability Report*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ratnasari, Y. (2011). Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report. *Skripsi*.
- Sari, M. P. (2013). Pengaruh Kinerja keuangan, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1-10.
- Sims. (2003). Matching leadership styles with employment modes: Strategic human resource management perspective. *Human resource management review*, 13, 127-152.
- Soelistyoningrum, J. (2011). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan. *Skripsi*.
- Sukada, S., & Jalal. (2008). Pelaporan Keberlanjutan: Alat Akuntabilitas dan Manajemen. *Pelatihan CSR: Strategy, Management and Leadership*. Jakarta.
- Suryawijaya, & Setiawan. (1998). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Politik dalam Negeri (Event study pada peristiwa 27 Juli 1996). *Journal Kelola No.18/VIII/1998*, 137-153.
- Suryono, H. (2011). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (Studi pada Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go Public) di BEI 2007-2009). *Skripsi*.
- Suryono, H., & Prastiwi, A. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Banda Aceh.

- Tanudjaja, B. B. (2009). *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Skripsi, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Tschopp. (2005). *Corporate Social Responsibility: A Comparison Between The United State And The European Union*. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 12, 55-59.
- Ullman, A. H. (1985). Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of US firms. *Academy of management review*, 540-557.
- Wibisono. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapka.
- Wibisono. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Meda Grapka.
- Zulfi, N. M. (2014, Agustus). *Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go Public di Indonesia*. Skripsi.